

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Intervensi pemerintah berada pada dua kaki dengan memberikan kebebasan yang terbatas kepada seorang perempuan. Satu kaki pemerintah memijak perempuan dalam beban domestik yang dikhususkan hanya untuk mereka melalui program – program PKK. Sementara kaki lainnya, berupaya menyejahterakan perempuan melalui pemberdayaan dalam bentuk peningkatan kapasitas, permodalan, fasilitas penunjang, serta legitimasi. Intervensi pada ranah legitimasi membantu individu ataupun kelompok perempuan dapat memiliki landasan yang lebih kuat untuk tumbuh dan berkembang, mendapatkan dukungan yang diperlukan, serta memberikan dampak yang lebih signifikan dan berkelanjutan bagi program, kelompok, dan kehidupan mereka. Walaupun memang dapat dikatakan secara keseluruhan, legitimasi yang diberikan oleh pemerintah kepada kelompok perempuan dan program pemberdayaan perempuan memberikan kekuatan yang sangat signifikan untuk pemerintah mengintervensi.

Lalu, pemberdayaan perempuan nelayan di Pantai Depok menunjukkan hasil positif, baik dari aspek individu maupun kelompok. Pemberdayaan yang dilakukan sudah mampu membuat perempuan menjadi lebih aktif, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang meningkat, dan mulai berperan sebagai pengajar di komunitas mereka. Mereka mulai berinovasi dan berinisiatif, seperti

menjual produk di warung atau kelontong, yang akhirnya meningkatkan penghasilan, membuka lapangan pekerjaan perempuan lainnya, dan mengembangkan kemandirian mereka.

Bukan hanya itu, pemberdayaan telah membantu perempuan nelayan di Pantai Depok keluar dari marginalisasi, memungkinkan mereka tetap bekerja di bidang yang mereka tekuni, bahkan menjadi pengusaha. Penghasilan mereka meningkat karena keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh dari program pemberdayaan, memberikan dampak positif pada stabilitas ekonomi mereka di masa depan. Namun, fenomena feminisasi dan segregasi pekerjaan masih lestari, di mana pekerjaan rumah tangga dan ekonomi masih didominasi oleh perempuan.

4.2 Saran

Pemberdayaan merupakan salah satu cara agar dapat memberikan pendidikan kepada masyarakat serta bantuan yang dapat meningkatkan kapasitasnya supaya bisa memajukan perekonomian dan kemampuan yang dimiliki.

1. Maka dari itu, pemberdayaan sudah seharusnya dapat diberikan kepada masyarakat tanpa terkecuali, baik yang memiliki kelompok dan tanda identitas seperti KUSUKA, maupun yang memang individual sebagai seorang pekerja dimasyarakat. Tidak boleh adanya diskriminasi yang terjadi jika itu demi memajukan kapasitas masyarakat dan perekonomian negara.
2. Pendataan dari para perempuan yang bekerja pada sektor perikanan sudah semestinya dilakukan secara menyeluruh agar *“no one left behind”* supaya program dan kebijakan yang akan dilaksanakan dapat lebih banyak menjangring

mereka. Lebih dari itu, ketika adanya pendataan menyeluruh dapat membantu pemerintah dalam mengetahui kondisi, potensi, dan dinamika yang para perempuan alami dalam sektor kelautan dan perikanan.

3. Adapun sebaiknya ketika pemerintah membangun organisasi yang dapat mampu membantu sebagai uluran tangan pemerintah dimasyarakat, sudah seyogyanya diberikan tempat khusus untuk mereka beroperasi sehari-harinya agar lebih menambah kenyamanan dan keefektifan mereka sebagai suatu organisasi. Dengan diberikannya tempat, mereka akan lebih leluasa dalam mengadakan pertemuan yang membantu meningkatkan produktivitas mereka.
4. Kemudian, terdapat kekeliruan yang mana pada misalnya PKK yang tidak diberikan pendanaan awal sebagai modal untuk membangun usaha mandiri. Sudah sepatutnya diberikan modal awal agar bisa dikembangkan. Dalam penelitian ini, beruntung karena Ketua Pokja II dapat memberikan masukan dan disetujui oleh para istri Kepala Dukuh, akan tetapi bila hal tersebut terjadi pada daerah yang tidak menerima atau tidak memiliki masukan demikian, pun pemerintah setempat tidak mempunyai sumber pendapatan, dengan begitu tidak akan mampu para perempuan di PKK ini menjalankan usaha mandiri dengan lancar
5. Bila berbicara terkait modal, Desa Prima juga sudah selayaknya mendapatkan permodalan secara kelompok bukan hanya pribadi. Hal ini disebabkan tujuan mereka selain dapat meningkatkan kapasitas secara individual, mereka berjalan sebagai sebuah kelompok utuh dan memiliki dasar hukum yang jelas-sudah ditetapkan